

**SAMBUTAN/PENGARAHAN
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
PADA ACARA PEMBUKAAN MUSRENBANG RKP
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2017**

Samarinda, 4 April 2016

Yth. Sdr. Menteri Koordinator Perekonomian;

**Yth. Sdr. Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Bappenas;**

Yth. Sdr. Menteri Perindustrian;

Yth. Sdr. Gubernur Kalimantan Timur;

Yth. Sdr. Ketua DPRD Kalimantan Timur;

Yth. Sdr. Unsur Pimpinan Instansi Vertikal;

Yth. Sdr. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;

Yth. Sdr. Bupati dan Walikota Se- Kalimantan Timur;

**Yth. Sdr. Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur;**

**Yth. Sdr. Tokoh Masyarakat, Pimpinan Organisasi
Kemasyarakatan/Kepemudaan, Akademisi;**

Para undangan serta Hadirin yang berbahagia.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Selamat Pagi dan Salam Sejahtera untuk kita semua,

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, kita dapat menghadiri acara pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur (RKPD) Tahun 2017, dalam keadaan sehat wal-afiat.

Forum Musrenbang ini mempunyai arti penting, sebab melalui forum ini seluruh pemangku kepentingan dapat melakukan penajaman, penyelarasan, dan klarifikasi sehingga tercapai kesepakatan terhadap rancangan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 yang telah disusun pemerintah daerah.

Hadirin peserta musrenbang yang berbahagia,

RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 263 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa “RKPD” merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memuat rancangan kerangka ekonomi dan prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun”. Oleh karena itu:

- Secara substansial, RKPD memuat seluruh program dan kegiatan dan pemanfaatan keuangan daerah yang akan

dilaksanakan oleh pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di daerah.

- Secara formal, RKPD menjadi landasan penyusunan kebijakan penganggaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dengan demikian, hasil kesepakatan terhadap RKPD yang telah dibahas bersama seluruh pemangku kepentingan, sepenuhnya menjadi landasan penyusunan R-APBD Tahun 2017.
- Secara operasional, RKPD memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewajiban masing-masing;
- Secara faktual, menjadi instrumen evaluasi untuk mengukur capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat RKPD memuat tolok ukur kinerja kepala daerah dalam merealisasikan program sesuai dengan visi dan misi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam tahun 2017.

Keberadaan dokumen RKPD haruslah memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan dokumen perencanaan jangka panjang daerah (RPJPD) dan dokumen rencana Perencanaan jangka menengah Daerah (RPJMD). Hal ini bertujuan untuk memastikan terwujudnya keberlanjutan

pembangunan yang telah direncanakan baik selama 20 tahun maupun 5 tahunan.

Berdasarkan hasil evaluasi Tahun 2015 terhadap realisasi penyusunan/penetapan dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur diperoleh data :

- 90% Kabupaten/Kota telah menetapkan RPJPD dan 10% belum menetapkan Perda tentang RPJPD;
- 90% Kabupaten/Kota telah menetapkan RPJMD dan 10% belum menetapkan Perda tentang RPJMD; dan
- 70% Kabupaten/Kota telah menetapkan Perkada RKPD tepat waktu dan 30% terlambat dalam menetapkan Perkada tentang RKPD.

Adapun realisasi penetapan dokumen Rencana Pembangunan Tahunan Daerah untuk Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan secara tepat waktu. Untuk prestasi ini kami memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Hadirin peserta musrenbang yang berbahagia,

Sesuai dengan Pasal 283 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan Urusan Pemerintahan. Terkait dengan hal

tersebut, beberapa strategi dalam penyusunan APBD Tahun 2017 yang perlu menjadi perhatian kita bersama adalah :

1. menerapkan prinsip efisien, efektifitas, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi;
2. keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan;
3. disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dan urusan yang menjadi kewenangan daerah; dan
4. menaati jadwal sesuai dengan tahapan penyusunan APBD.

Selanjutnya, sebagaimana kita pahami bersama bahwa RKPD menjadi dasar penyusunan APBD. Oleh karena itu agar tercipta konsistensi dan sinkronisasi dokumen rencana dan penganggaran maka beberapa hal perlu menjadi perhatian kita bersama yaitu :

- 1) susun dan tetapkan dokumen rencana pembangunan daerah sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010;
- 2) jabarkan RPJMD ke dalam RKPD Tahun 2017 dan menganggarkan dalam APBD Tahun 2017 secara konsisten guna mendorong terciptanya tatakelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab serta terpenuhinya janji politik gubernur, bupati dan walikota sesuai dengan harapan masyarakat yaitu memperoleh kehidupan yang lebih sejahtera;
- 3) lakukan pengendalian dan evaluasi dokumen rencana pembangunan daerah dan dokumen perangkat daerah meliputi 3 (tiga) aspek yaitu kebijakan, pelaksanaan, dan

evaluasi hasil seara tepat waktu dan tepat substansi, serta lakukan pelaporan terhadap hasil evaluasi dimaksud; dan

- 4) bangun dan kembangkan komunikasi yang harmonis antara eksekutif dan legislatif agar memiliki pemahaman dan persepsi yang sama dan holistik tentang perencanaan dan penganggaran.

Hadirin peserta musrenbang yang berbahagia,

Beberapa isu strategis pembangunan yang perlu mendapat perhatian di Provinsi Kalimantan Timur, antara lain:

1. Konektivitas wilayah, meningkatkan keterkaitan desa-kota. Keterkaitan (konektivitas) wilayah memiliki fungsi yang sangat penting, khususnya sebagai katalisator dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah.
2. Kedaulatan Pangan, merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.
3. Energi, dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar energi listrik di seluruh wilayah Indonesia, dalam tahun 2015 – 2019 direncanakan akan dibangun pembangkit listrik guna meningkatkan kemandirian energi. Selain pembangunan pembangkit, dilakukan pula pengembangan biogas ramah

lingkungan dan penyediaan bahan bakar minyak di wilayah terpencil dan perbatasan.

4. Hutan, merupakan paru-paru dunia yang harus dilindungi. Sebagian besar wilayah Indonesia terdapat hutan lindung, akan tetapi rentan dengan kondisi kebakaran hutan yang terjadi selama ini dan harus segera diselesaikan oleh pemerintah maupun oleh pemerintah daerah. Oleh Karena itu perlu dilakukan langkah-langkah preventif dengan mensiagakan aparat keamanan hutan dan mendekteksi titik api yang berpotensi kebakaran hutan.
5. Kemaritiman, wilayah perairan Indonesia memiliki posisi yang cukup strategis baik di koridor regional ASEAN maupun global sehingga banyak sekali potensi di bidang kemaritiman, seperti pertambangan baik migas maupun non-migas, kekayaan cadangan minyak bumi, gas, batubara, serta cadangan bijih besi terbesar di Indonesia. Infrastruktur, sebagai penunjang dari aktivitas ekonomi juga dihadapkan pada isu keterbatasan aksesibilitas masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar (energi dan sumber daya air);
6. Wilayah perbatasan, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, sasaran pengembangan wilayah terkait kawasan perbatasan adalah mewujudkan halaman depan Negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlu penajaman pencapaian sasaran terhadap Nawa Cita agar diselaraskan dengan bidang urusan sesuai kewenangan dalam urusan antara lain: agro industri, ketahanan pangan, energi dan sumber daya mineral, dan infrastruktur yang didasarkan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Hadirin peserta musrenbang yang berbahagia,

Tujuan dan sasaran pembangunan Nasional dan Daerah hanya dapat dicapai secara berhasil guna dan berdayaguna apabila didukung dengan situasi dan kondisi keamanan, ketentraman dan ketertiban yang kondusif.

Akhir-akhir ini aksi terorisme, penyebarluasan ideologi yang bertentangan dengan UUD 45 dan Pancasila semakin meningkat. Demikian halnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak serta trafficking, peredaran dan penggunaan miras, narkoba, psikotropika yang telah menelan korban jiwa. Secara keseluruhan telah meresahkan masyarakat tidak hanya di perkotaan, tetapi sampai ketinggian perdesaan.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa koordinasi FORKOMPIMDA, seluruh jajaran terkait perlu ditingkatkan guna melakukan pencegahan dan menangkal gangguan keamanan untuk menciptakan situasi yang aman, tentram dan tertib.

Bagi kepala daerah yang telah dilantik maka berkewajiban menyusun dan menetapkan Perda tentang RPJMD

paling lambat 6 (enam) bulan sejak dilantik dan menetapkan Perkada tentang RKPD Tahun 2017.

Saudara-saudara peserta Musrenbang yang berbahagia,

Dalam forum musrenbang ini, akan dibahas penyelarasan program-program pembangunan yang direncanakan di Provinsi Kalimantan Timur. Penyelarasan hendaknya dilakukan dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip yang mendorong tercapainya keserasian, efektifitas dan efisiensi pemanfaatan sumber pendanaan pembangunan daerah. Berbagai program dan kegiatan pembangunan daerah yang perlu diintegrasikan dengan program dan kegiatan pembangunan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, supaya dikoordinasikan dengan Kementerian/Lembaga terkait dan dibahas lebih lanjut dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan nasional.

Kepada pimpinan dan anggota DPRD dan seluruh pemangku kepentingan lainnya yang hadir dalam musrenbang ini, diharapkan dapat memberi saran dan masukan agar RKPD Tahun 2017 selaras dengan prioritas dan sasaran pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 dengan RPJM Nasional Tahun 2015-2019. Selain dari pada itu, mengawal konsistensi baik penganggaran pada APBD Tahun Anggaran 2017 mendatang, maupun dalam pelaksanaannya.

Hanya dengan komitmen yang tinggi dan bekerjasama dengan melibatkan seluruh kelompok dan lapisan masyarakat, kita akan dapat mewujudkan “Indonesia Yang Berdaulat,

Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” sesuai dengan visi pembangunan Indonesia Tahun 2015-2019.

Demikian beberapa hal yang dapat disampaikan, Semoga Allah SWT memberikan ridho atas segala upaya yang kita lakukan dalam membangun daerah.

Selanjutnya saya mengucapkan, selamat mengikuti Musrenbang RKPD Tahun 2017 untuk meraih apa yang dicita-citakan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

**Sekian dan Terima kasih,
Wabillahittaufik wal hidayah
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

MENTERI DALAM NEGERI

TJAHJO KUMOLO